

## PENGARUH *GOOD PUBLIC GOVERNANCE* (GPG) TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KEDIRI

M. Anas

Magister Pendidikan Ekonomi, Pascasarjana, Universitas Nusantara PGRI Kediri  
[anas@unpkediri.ac.id](mailto:anas@unpkediri.ac.id)

Rr. Forijati

Magister Pendidikan Ekonomi, Pascasarjana, Universitas Nusantara PGRI Kediri  
[forijati@unpkediri.ac.id](mailto:forijati@unpkediri.ac.id)

Mochamad Muchson

Magister Pendidikan Ekonomi, Pascasarjana, Universitas Nusantara PGRI Kediri  
[mucshon@unpkediri.ac.id](mailto:mucshon@unpkediri.ac.id)

---

### Informasi Artikel

### Abstract

Tanggal Masuk:  
19 Agustus 2020

Tanggal Revisi:  
20 September 2020

Tanggal Diterima:  
12 Desember 2020

Publikasi On line:  
1 Maret 2021

*The purpose of village development in achieving the welfare of the village community requires a good village governance in carrying out public services. The implementation of quality village government will create an orderly life of government and society and will realize the expected good public governance (GPG). One form of service output that reflects government performance which is also an instrument of government accountability to stakeholders is financial reports. Quality village financial reports are information that can present honestly, truthfully, relevantly, reliably, can be compared, and can be understood by all parties related to the financial statements. The research objective was to test empirically and to analyze the effect of GPG on the quality of information on village government financial reports in Kediri Regency. The research sample was 52 villages in Kediri Regency with respondents who were managers of village financial reporting. The research data were obtained through an instrument in the form of a questionnaire. Hypothesis testing is carried out by multiple linear regression analysis using the SPSS V.23 application. The results of data analysis prove that the accountability and fairness variables and equality variables have a significant effect on the quality information of village financial report, while the variables of democracy, transparency, and legal culture have no significant impact on the quality information of village government financial reports.*

**Key Words: GPG; accountability; equality; fairness; the quality information of the financial statements**

### Abstrak

Tujuan pembangunan desa dalam mencapai kesejahteraan masyarakat desa diperlukan suatu tata pemerintahan desa yang baik dalam menyelenggarakan layanan publik. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas akan mewujudkan suatu kehidupan pemerintahan dan masyarakat yang teratur dan akan mewujudkan *good public governance* (GPG) yang diharapkan bersama. Salah satu bentuk output layanan yang merefleksikan kinerja pemerintah yang juga merupakan instrumen pertanggungjawaban pemerintah kepada stakeholders adalah laporan keuangan. Laporan keuangan desa yang berkualitas merupakan informasi yang dapat menyajikan secara jujur, benar, relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terkait dengan laporan keuangan tersebut. Tujuan penelitian untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh GPG terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah desa di Kabupaten Kediri. Sampel penelitian sebanyak 52 desa di Kabupaten Kediri dengan responden pengelola laporan keuangan desa. Data penelitian diperoleh melalui instrumen berupa kuesioner. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS V.23. Hasil analisis data membuktikan bahwa variabel akuntabilitas dan kewajaran dan variabel kesetaraan berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa, sedangkan variabel-variabel demokrasi, transparansi, dan budaya hukum tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah desa.

**Key Words: GPG; akuntabilitas; kesetaraan; kewajaran; kualitas informasi laporan keuangan**

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintahan desa untuk memiliki secara otonomi dalam mengatur tata kehidupan desa dalam berbagai aspek yang meliputi: pemerintahan, pembangunan, keuangan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan utama diberlakukannya regulasi ini untuk mencapai tujuan umum pemerintah yaitu kesejahteraan masyarakat. Ketercapaian tujuan yang dikehendaki tersebut dapat direalisasikan jika terpenuhinya kondisi suatu tata pemerintahan desa yang baik dalam penyelenggaraan layanan public yang dilakukan para aparatur pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan berkualitas tinggi pada gilirannya akan dapat mewujudkan *good public governance* (GPG) yang diharapkan bersama. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dan menilai tingkat kesejahteraan masyarakat adalah berupa implementasi sistem pemerintahan desa yang dijalankan dengan baik.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menekankan bahwa institusi publik wajib melaksanakan GPG dalam suatu proses kegiatan, merumuskan kebijakan, dan melaksanakan tindakan dalam menyusun perencanaan, melaksanakan program kegiatan, mengendalikan operasional, dan mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien (KNKG, 2008).

Laporan keuangan desa merupakan *output* layanan yang merefleksikan kinerja pemerintahan desa. Laporan ini juga merupakan instrumen pertanggungjawaban pemerintahan desa kepada *stakeholders*. Dengan demikian implementasi GPG tersebut dapat mempengaruhi kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan (Astuti, 2020). Laporan keuangan desa dikatakan berkualitas jika informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut dapat menyajikan secara jujur, benar, relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terkait dengan laporan keuangan tersebut. Syarat kualitatif laporan keuangan pemerintahan desa tersebut penting dipenuhi oleh penyedia laporan keuangan karena akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, informasi keuangan yang berkualitas akan dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah desa (Modo, Saerang and Poputra, 2016).

Beberapa penelitian terdahulu dengan topik GPG telah dilakukan. Umumnya penelitian tersebut mengkaji kausalitas GPG dengan kinerja manajerial (institusional maupun sumberdaya manusia). Hasil penelitian (Fahmi and Syah, 2016) menyimpulkan bahwa GPG mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja guru ekonomi SMA di Kota Semarang dengan terlebih dahulu mempengaruhi *teacher's work engagement* (TWE), namun GPG secara langsung memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kinerja guru. Hasil penelitian (Anom, Dewi and Suardani, 2018) menunjukkan bahwa elemen GPG yang terdiri dari akuntabilitas, budaya hukum, *fairness*, dan integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja kepolisian Resor Karangasem, sedangkan transparansi dan demokrasi tidak berpengaruh secara signifikan. Keterkaitan antara GPG dan pengendalian internal dengan kualitas informasi laporan keuangan juga telah dianalisis oleh (Astuti, 2020). Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaruh GPG dan pengendalian internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kota Ambon baik secara parsial maupun secara simultan didukung dengan data empiris.

Penelitian untuk mendapatkan data empiris guna mengetahui keterkaitan GPG dengan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah desa sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Di lain pihak, beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji kausalitas variabel-variabel GPG dengan kinerja sebagaimana dipaparkan sebelumnya menunjukkan hasil yang inkonsisten. Fenomena demikian ini yang memberikan motivasi peneliti untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh GPG terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah desa. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh masing-masing elemen GPG yang meliputi: demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, dan kewajaran dan kesetaraan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah desa di Kabupaten Kediri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis maupun teoritis. Manfaat praktis berupa masukan bagi aparatur pemerintahan desa terkait dengan implementasi GPG. Adapun manfaat teoritis berupa tersedianya khazanah kajian terkait dengan GPG dan kualitas informasi laporan keuangan pemerintahan desa yang dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan berbagai penelitian di masa mendatang.

## TINJAUAN PUSTAKA/KAJIAN TEORITIS

### Akuntansi Sektor Publik

Secara garis besar akuntansi dikelompokkan menjadi dua, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi sektor publik. Akuntansi keuangan diperuntukkan bagi entitas yang berorientasi profit, sedangkan akuntansi sektor publik merupakan akuntansi yang diperuntukkan bagi entitas yang berorientasi memberikan layanan kepada masyarakat (publik) dan bukan berorientasi laba. Pada akuntansi keuangan, digunakan suatu standar akuntansi yang ditetapkan oleh organisasi profesi akuntan yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari akuntansi sektor publik karena sektor pemerintahan merupakan entitas yang tujuannya menyelenggarakan layanan publik dan bukan berorientasi laba. Penyelenggaraan akuntansi pemerintahan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah ini tidak hanya berlaku bagi penyelenggaraan akuntansi bagi pemerintah pusat saja, namun juga sebagai standar bagi pelaporan keuangan bagi pemerintahan di bawahnya: pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan juga pemerintahan desa.

### Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang dihasilkan oleh suatu entitas baik entitas bisnis maupun non bisnis (public) termasuk entitas pemerintahan desa. Laporan keuangan merupakan asersi manajemen, yang dalam konteks pemerintahan desa disebut aparatur/perangkan desa yang memuat informasi keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan sebagai bahan pengambilan keputusan ekonomi. Pengguna laporan keuangan pemerintah, termasuk pemerintah desa terdiri atas: masyarakat, wakil masyarakat desa (BPD), lembaga pemeriksa, lembaga pengawas, donatur, kreditor, investor, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, serta pemerintah pusat. Oleh karena itu laporan keuangan pemerintah desa tidak seharusnya didesain dalam rangka memenuhi tujuan spesifik pengguna tertentu saja melainkan harus didesain untuk mencapai tujuan secara umum dalam rangka memenuhi kebutuhan berbagai pihak. Disamping itu, laporan keuangan pemerintahan desa juga merupakan wujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa, oleh karena itu, sebagai entitas pelaporan, pemerintah desa berkepentingan agar laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga harus memenuhi syarat kualitas yang dikehendaki. Sebagaimana digariskan oleh Komisi Akuntansi Sektor Publik, bahwa laporan keuangan pemerintah dikatakan memiliki syarat kualitas apabila telah memenuhi kriteria: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (KASP, 2019)

### Good Public Governance (GPG)

Sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan nasional Negara Indonesia meliputi: perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, tercapainya kesejahteraan umum, semakin cerdasnya kehidupan berbangsa dan bernegara, dan selalu aktif memelihara ketertiban dunia. Guna mencapai tujuan tersebut maka merupakan suatu keharusan diwujudkan suatu negara, termasuk di dalamnya pemerintahan desa yang berdaya saing, pemerintahan yang sehat dan berkualitas tinggi. Pemerintahan desa yang demikian ini yang nantinya akan memiliki kemampuan menciptakan nilai tambah secara berkesinambungan. Pemerintahan desa yang berkualitas akan mampu melakukan pengelolaan sumberdaya secara bertanggung jawab sehingga pada gilirannya akan terbangun kredibilitas institusi pemerintahan desa baik secara lokal, regional, nasional, dan internasional. (KNKG, 2008) menyatakan bahwa GPG memiliki pengaruh besar terhadap terwujudnya *good governance* secara menyeluruh, baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pemerintahan desa itu sendiri, maupun dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk penerapan *good corporate governance* (GCG) oleh dunia usaha.

GPG merupakan suatu sistem yang mengatur tata cara dan berbagai regulasi dalam berperilaku bagi institusi pemerintahan dalam menjalankan tugas melayani kepentingan publik secara akuntabel dan bertanggung jawab. Tidak hanya itu, GPG juga merupakan pengelolaan kewenangan yang dimiliki oleh penyelenggara Negara, termasuk didalamnya adalah pemerintahan desa dalam mengatur pola relasi antara penyelenggara dengan lembaga Negara, relasi antara penyelenggara Negara dengan masyarakatnya, juga antara suatu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep GPG secara fungsional merupakan salah satu aspek dari konsep governance yang diimplementasikan pada suatu institusi pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan desa konsep GPG merupakan implementasi apakah suatu

pemerintahan desa telah menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien dalam upaya merealisasikan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Astuti, 2020). Pedoman Umum GPG Indonesia sebagaimana digariskan oleh Komite Nasional Kebijakan Governnace (KNKG) menyatakan terdapat lima pilar dalam implementasi GPG tersebut. Kelima pilar PGP sebagaimana dimaksud terdiri atas: demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, dan kewajaran, dan kesetaraan. (KNKG, 2008).

### **Kerangka Konsptual dan Pengembangan Hipotesis Pengaruh Demokrasi terhadap Kualitas Infomasi Laporan Keuangan**

Demokrasi didefinisikan sebagai pelibatan partisipasi masyarakat atau *stakeholder* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai salah satu bentuk implementasi GPG, demokrasi disamping mengandung unsur pelibatan masyarakat, juga ditandainya dengan sikap menghargai perbedaan yang ada. Sikap-sikap tersebut dikembangkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari penyelenggaraan pemerintahan desa, prinsip-prinsip demokrasi diimplementasikan dalam berbagai kegiatan, misalnya pemilihan perangkat desa, proses penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat desa, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam berbagai bentuk kegiatan tersebut dititikberatkan pada pola hubungan pengambilan kebijakan musyawaran mufakat dengan berorientasi kepada cita-cita bersama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Laporan keuangan pemeintahan desa yang dihasilkan melalui suatu proses penyusunan perencanaan yang demokratis dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku akan memiliki kualitas informasi yang memadai. (Hasthoro and Sunardi, 2016) membuktikan secara empiris bahwa budaya demokrasi yang diimplementasikan pada pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Selanjutnya beberapa hasil penelitian sebagai mana dilakukan (Astuti, 2020), (Mursidah and Khairina, 2018) membuktikan bahwa variabel demokrasi sebagai unsur GPG memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan argumen ini maha hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Demokrasi berpengaruh signifikan terhadap kulitas informasi laporan keuangan pemerintah desa di Kabupaten Kediri.

### **Pengaruh Transparansi terhadap Kualitas Infomasi Laporan Keuangan.**

Transparansi dalam penelitian ini diartikan sebagai adanya suatu pengungkapan yang memadai dalam setiap informasi yang disampaikan oleh pemerintahan desa. Informasi laporan keuangan desa dikatakan transparan apabila informasi tersebut mudah didapatkan dan diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang memerlukan informasi dimaksud. Transparansi sebagai salah satu implementasi GPG diperlukan dalam penyusunan RAPB Desa maupun pelaksanaan dan pertanggungjawabannya oleh pemerintahan desa (KNKG, 2008). Namun demikian asas transparansi tersebut dilaksanakan dengan tidak mengurangi kewajiban lembaga negara termasuk entitas pemerintahan desa maupun penyelenggaran negara untuk menjaga kerahasiaan kepentingan institusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa hasil penelitian telah membuktikan bahwa secara empiris prinsip-prinsip *Good Governance* mempunyai hubungan yang tinggi dan signifikan dengan kinerja pemerintahan daerah (Azlina and Amelia, 2015), (Uar, 2016), (Fahmi and Syah, 2016). Adapun (Mursidah and Khairina, 2018), dan (Dyah Setyaningrum, 2017) membuktikan bahwa GPG secara empiris memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Berdasarkan fenomena ini hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H2: Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kulitas informasi laporan keuangan pemerintah desa di Kabupaten Kediri.

### **Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Infomasi Laporan Keuangan.**

Akuntabilitas dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kewajiban pemerintahan desa untuk secara bertanggung jawab menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam pelaporan keuangan pemerintahan desa. Implementasi konsep akuntabilitas sesuai GPG mengandung makna bahwa pemerintah desa berkewajiban melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara bertanggung jawab agar sesuai dengan harapan sebagaimana diamanahkan oleh peraturan perudang-undangan. Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk peran pemerintah desa dalam memerikan layanan kepada

masyarakat. Layanan kepada masyarakat tersebut dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel. (Moedarlis, 2016).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk keharusan kepala desa untuk meyakinkan bahwa tugas dan kewajibannya yang diembannya dalam semua aspek sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa akuntabilitas sebagai implementasi SAP secara empiris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi pada kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Upabayu, Mahaputra and Putra, 2014). Demikian pula hasil penelitian (Anom, Dewi and Suardani, 2018) membuktikan bahwa akuntabilitas memiliki peran positif dan signifikan terhadap kinerja lembaga kepolisian. Penerapan *Good Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pemberian layanan publik pada pemerintah daerah provinsi di Indonesia (Dwi Susanto, Dian Anggraeni Yusuf, 2014). Berdasarkan paparan tersebut, maka hipotesis ketiga penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H3: Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah desa di Kabupaten Kediri.

#### **Pengaruh Budaya Hukum terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.**

Budaya hukum dalam penelitian ini diartikan sebagai upaya penegakan hukum (*low inforcement*). Prinsip dalam budaya hukum yang utama menekankan adanya persamaan dan kesetaraan hukum bagi setiap individu di dalam masyarakat desa. Oleh karenanya aparat pemerintah desa memiliki kewajiban untuk membangun dan berupaya menegakkan hukum dalam menjalankan fungsinya dalam masyarakat desa. Peran pemerintahan desa tersebut dapat terpenuhi dengan baik jika dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi budaya hukum dalam konteks pengelolaan keuangan desa berupa: penyusunan dan penetapan peraturan desa tentang APBDesa selayaknya dilakukan secara terkoordinasi, transparan, akuntabel dan partisipatif sehingga memenuhi ketentuan yang berlaku. Demikian halnya dengan pelaksanaan APBDesa, hendaknya pemerintah desa melaksanakannya secara profesional, jujur dan taat asas sehingga terhindar dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dengan demikian bila budaya hukum ini dapat dijalankan secara optimal diharapkan kualitas informasi laporan keuangan desa dapat dipenuhi sebagaimana diharapkan.

Hasil penelitian terdahulu memberikan bukti secara empiris bahwa faktor-faktor eksternal yang didalamnya mencakup kepatuhan terhadap hukum mempengaruhi secara signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan (Harlinda, 2016). Disamping itu, budaya hukum juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja lembaga (Dwi Susanto, Dian Anggraeni Yusuf, 2014), (Anom, Dewi and Suardani, 2018), (Dwi Susanto, Dian Anggraeni Yusuf, 2014). Dan, budaya hukum juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah (Hasthoro and Sunardi, 2016), dan (Kawedar *et al.*, 2019). Berdasarkan paparan tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis keempat:

H4: Budaya hukum berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah desa di Kabupaten Kediri.

#### **Pengaruh Kewajaran dan Kesetaraan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.**

Kewajaran dan kesetaraan dalam penelitian ini diartikan sebagai upaya pemerintahan desa yang diorientasikan kepada pemberian layanan untuk kepentingan masyarakat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Layanan yang dapat diberikan oleh pemerintah desa dapat berupa layanan administrative, juga layanan atas tersedianya informasi laporan keuangan desa. Aspek kewajaran dan kesetaraan dalam konsepsi GPG merupakan implementasi dari fungsi pemerintahan desa yang telah melaksanakan tugasnya dengan memberikan layanan kepada pemangku kepentingan secara wajar dan tidak tebang pilih sehingga kepentingan masyarakat desa dapat terlayani dengan baik.

Hasil penelitian (Anom, Dewi and Suardani, 2018), (Azlina and Amelia, 2015), dan (Fahmi and Syah, 2016) menyatakan bahwa kewajaran dan kesetaraan memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja institusi. Sedangkan (Harlinda, 2016), (Mursidah and Khairina, 2018), dan (Astuti, 2020) menyimpulkan bahwa GPG memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan paparan tersebut, hipotesis penelitian ini dirumuskan:

H5: Kewajaran dan kesetaraan berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah desa di Kabupaten Kediri.

(ARIAL NARROW 11pt)

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh aspek-aspek GPG yang meliputi: demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, dan kewajaran dan kesetaraan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintahan desa di Kabupaten Kediri. Data penelitian yang dikumpulkan dan dianalisis merupakan data primer yang diperoleh melalui instrument penelitian berupa kuesioner yang didesain secara terstruktur berdasarkan indikator-indikator dalam setiap variabel penelitian.

Terdapat enam variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel independen berupa GPG yang meliputi: Demokrasi (X1), Transparansi (X2), Akuntabilitas (X3), Budaya hukum (X4), dan Kewajaran dan kesetaraan (X5), serta satu variabel terikat berupa Kualitas informasi laporan keuangan (Y). Definisi dan pengukuran variabel independen merujuk pada (KNKG, 2008). Sedangkan pengukuran variabel kualitas informasi laporan keuangan pemerintah desa didasarkan pada (KASP, 2019). Indikator variabel demokrasi meliputi: partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat, dan perwujudan kepentingan umum. Variabel transparansi terdiri atas indikator: pengungkapan, kemudahan akses. Indikator variabel akuntabilitas meliputi: jujur, terukur, dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Variabel budaya hukum meliputi indikator: koordinasi, transparan dan akuntabel, dan taat asas. Kewajaran dan kesetaraan diukur dengan indikator: perlindungan hak masyarakat, kualitas standar layanan, dan lingkungan, kepentingan, dan masukan masyarakat. Adapun variabel kualitas informasi laporan keuangan diukur dengan indikator: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Populasi penelitian ini terdiri atas desa di wilayah Kabupaten Kediri sebanyak 343 desa. Sampel penelitian ini sebanyak 52 desa, dengan menentukan dua desa untuk setiap kecamatan yang dilakukan secara acak (*random sampling*). Responden penelitian ini berupa perangkat desa yang terlibat dalam pelaporan keuangan desa. Pengolahan data penelitian dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS Versi. 23. Uji kualitas instrumen kuesioner dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Sedangkan uji hipotesis dilakukan dengan regresi linier berganda dengan terlebih dulu dilakukan uji asumsi klasik.

## HASIL PENELITIAN

### Uji Kualitas Data

Data penelitian ini berupa data primer yang diperoleh melalui instrumen penelitian berupa kuesioner. Guna menjamin bahwa data tersebut berkualitas agar layak dijadikan data penelitian maka perlu dilakukan uji reliabilitas dan uji validitas instrument penelitian. Hasil pengujian reliabilitas disajikan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1  
Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
Demokrasi (X1)	1,000	0,05	Reliabel
Transparansi (X2)	0,750	0,05	Reliabel
Akuntabilitas (X3)	0,690	0,05	Reliabel
Budaya Hukum (X4)	0,629	0,05	Reliabel
Kewajaran (X5)	0,760	0,05	Reliabel
Kualitas LK (Y)	0,829	0,05	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2020

Tabel 1 menunjukkan bahwa semua item kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data penelitian menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari nilai signifikansi sebesar 0,05. Ini berarti kuesioner penelitian dinyatakan reliabel dan memiliki kualitas yang layak karena menunjukkan konsistensi.

Tabel 2 menunjukkan bahwa semua item kuesioner dalam setiap variabel penelitian menghasilkan nilai lebih besar dari 0,05. Dengan demikian disimpulkan bahwa semua item kuesioner dalam penelitian ini valid.

Tabel 2  
Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Item Kuesioner	Nilai Pearson Correlation	Kriteria	Keterangan
Demokrasi (X1)	X1.1	0,177	0,05	Valid
	X1.2	0,177	0,05	Valid
	X1.3	0,177	0,05	Valid
Transparansi (X2)	X.2.1	0,846	0,05	Valid
	X.2.2	0,814	0,05	Valid
Akuntabilitas (X3)	X.3.1	0,870	0,05	Valid
	X.3.2	0,854	0,05	Valid
	X.3.3	0,626	0,05	Valid
Budaya Hukum (X4)	X.4.1	0,800	0,05	Valid
	X.4.2	0,636	0,05	Valid
	X.4.3	0,850	0,05	Valid
Kewajaran (X5)	X.5.1	0,693	0,05	Valid
	X.5.2	0,792	0,05	Valid
	X.5.3	0,780	0,05	Valid
Kualitas LK (Y)	Y.1	0,692	0,05	Valid
	Y.2	0,810	0,05	Valid
	Y.3	0,896	0,05	Valid
	Y.4	0,871	0,05	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2020

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji normalitas diperlukan guna mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji normalitas Kolmogorof-Smirnof dengan bantuan aplikasi SPSS Versi. 23. Hasil uji normalitas sebagaimana tampak pada tabel 3 menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) menghasilkan nilai sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa nilai residual data penelitian ini berdistribusi normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil uji normalitas data telah memenuhi persyaratan asumsi klasik.

Tabel 3  
Hasil Pengujian Normalitas Kolmogorov-Smirnov

Unstandardized Residual		
N		52
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,000000
	Std. Deviation	1,7850652
Most Extreme Differences	Absolute	0,106
	Positive	0,065
	Negative	-0,106
Test Statistic		0,106
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data primer diolah, 2020

### Uji Multikolinieritas

Tujuan uji multikolinieritas dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Dalam model regresi yang baik, sebagai persyaratan asumsi klasik diharuskan bahwa antar variabel independen tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dengan menggunakan SPSS Versi. 23 dihasilkan output sebagaimana tampak pada tabel 4.

Tabel 4  
Hasil Pengujian Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Demokrasi (X1)	0,926	1,079	Tidak terjadi multikol
Transparansi (X2)	0,803	1,245	Tidak terjadi multikol
Akuntabilitas (X3)	0,619	1,616	Tidak terjadi multikol
Budaya Hukum (X4)	0,739	1,354	Tidak terjadi multikol
Kewajaran (X5)	0,954	1,048	Tidak terjadi multikol

Sumber: Data primer diolah, 2020

Indikasi multikolinieritas dapat ditentukan berdasarkan nilai Tolerance nilai VIF. Berdasarkan nilai Tolerance didapatkan bahwa semua variabel bebas menghasilkan nilai yang lebih besar dari 0,10, atau nilai VIF untuk semua variabel bebas lebih kecil dari 10,00, yang berarti tidak ditemukan korelasi antar variabel bebas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini memenuhi syarat asumsi klasik, karena tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas.

### Uji Autokorelasi

Tabel 5  
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,641 <sup>a</sup>	0,411	0,347	1,87958	1,997

Sumber: Data primer diolah, 2020

Hasil uji autokorelasi sebagaimana tampak pada Tabel 5 menghasilkan nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,997. Sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dengan jumlah data (n) = 52 dan jumlah variabel independen (k) = 5 menghasilkan nilai dL sebesar 1,575 dan dU sebesar 1,780. Oleh karena nilai DW terletak antara dU dan (4-dU), atau  $1,575 < 1,997 < 2,22$ , dengan demikian berarti tidak terdapat autokorelasi.

### Uji Hipotesis

Uji hipotesis secara simultan dilakukan guna mengetahui pengaruh variabel GCG yang terdiri atas demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, dan kewajaran dan kesetaraan secara bersama-sama terhadap variabel kualitas informasi laporan keuangan. Uji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dilakukan dengan Uji F dengan bantuan aplikasi SPSS Versi 23. Hasil uji F disajikan pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 6  
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	113,548	5	22,710	6,428	0,000 <sup>b</sup>
	Residual	162,509	46	3,533		
	Total	276,058	51			

Sumber: Data primer diolah, 2020



Tabel 5 menunjukkan bahwa hasil uji simultan menghasilkan nilai F hitung sebesar 6,428 dan signifikansi menghasilkan angka 0,000. Ini menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel (2,31) dan nilai sig.  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua unsur GPG yang terdiri atas: demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, dan kewajaran dan kesetaraan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa di kabupaten Kediri.

Guna mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri atas: Demokrasi (X1), Transparansi (X2), Akuntabilitas (X3), Budaya hukum (X4), dan Kewajaran dan Kesetaraan (X5) terhadap variabel dependen yaitu Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y) dilakukan dengan uji parsial (Uji t). Hasil uji t dengan menggunakan SPSS Versi 23 tersaji pada tabel 7.

Tabel 7  
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-2,298	4,465		-0,515	0,609
	Demokrasi	0,036	0,018	0,236	2,007	0,051
	Transparansi	-0,532	0,403	-0,167	-1,320	0,193
	Akuntabilitas	0,608	0,239	0,365	2,541	0,014
	Budaya Hukum	0,315	0,212	0,196	1,487	0,144
	Kewajaran	0,855	0,199	0,498	,302	0,000

Sumber: Data primer diolah, 2020

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai sig. variabel demokrasi (0,051) lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa variabel demokrasi berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel kualitas informasi laporan keuangan. Adapun variabel transparansi menunjukkan nilai sig. 0,193, lebih besar dari 0,05. Dengan demikian variabel transparansi berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel kualitas informasi laporan keuangan. Selanjutnya pada variabel akuntabilitas menunjukkan nilai sig. sebesar 0,014 dan ini lebih kecil dari 0,05, yang berarti variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kualitas informasi laporan keuangan. Pada variabel budaya hukum, angka sig. sebesar 0,144 dan ini lebih besar dari 0,05, berarti variabel budaya hukum berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel akuntabilitas. Adapun variabel kewajaran menunjukkan nilai sig. 0,000. Variabel ini berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kualitas informasi laporan keuangan, karena angka sig. sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi dalam penelitian ini dilakukan dengan uji *Goodness of Fit* dengan bantuan aplikasi SPSS Versi 23. Hasil Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini.

Tabel 8  
Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	0,641 <sup>a</sup>	0,411	0,347	1,87958

Sumber: Data primer diolah, 2020

## PEMBAHASAN

Hipotesis pertama penelitian ini menyatakan bahwa demokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa di Kabupaten Kediri. Berdasarkan hasil uji data pada tabel 7 diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,007 yang berarti lebih besar dari t tabel (1,6598) dan tingkat signifikansi 0,051 yang

berarti lebih kecil dari 0,05. Hasil pengujian membuktikan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan demokrasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa di Kabupaten Kediri tidak didukung data empiris. Meskipun arah hubungannya positif tetapi pengaruh demokrasi kualitas informasi laporan keuangan desa di Kabupaten Kediri tidak signifikan. Hasil penelitian ini mengonfirmasi penelitian (Anom, Dewi and Suardani, 2018). Dilain pihak hasil penelitian ini menfalsifikasi hasil penelitian (Uar, 2016), (Fadilah, 2013), dan (Astuti, 2020).

Demokrasi merupakan suatu kondisi dimana penyelenggaraan Negara, dalam hal ini perangkat desa memiliki kemampuan untuk mendengar aspirasi masyarakat, memilah berbagai persoalan yang dihadapi, memilih tindakan dari berbagai alternatif yang ada, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan tetap berpegang pada kepentingan umum. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa perangkat desa di Kabupaten Kediri masih kurang optimal dalam melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pelaporan keuangan.

Pada hipotesis kedua yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan dalam penelitian ini tidak didukung dengan data empiris. Hasil pengujian secara empiris menunjukkan bahwa nilai  $t$  hitung sebesar -1,320 dan angka sig.i sebesar 0,193. Nilai  $t$  hitung tersebut lebih kecil dari nilai  $t$  tabel (1,6598) dengan signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa di Kabupaten Kediri. Hasil penelitian ini mengonfirmasi penelitian (Anom, Dewi and Suardani, 2018) dan bertentangan dengan hasil beberapa penelitian sebelumnya sebagaimana dilakukan oleh (Zeyn, 2011), (Astuti, 2020), dan (Upabayu, Mahaputra and Putra, 2014) yang menyatakan bahwa transparansi memberikan kontribusi signifikan dan memiliki arah hubungan positif dengan kualitas informasi laporan keuangan.

Transparansi memiliki makna bahwa pengungkapan laporan keuangan dilakukan dengan memadai sehingga memberikan informasi yang lengkap dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan dengan mudah. Tujuan adanya transparansi adalah agar timbul partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa di Kabupaten Kediri belum melakukan transparansi dengan memberikan informasi yang memadai dan belum mempublikasikan laporan keuangan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, misalnya dengan publikasi pada situs atau website desa. Publikasi atas informasi APBDesa selama ini sebatas pada pemasangan banner di kantor desa.

Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa di Kabupaten Kediri dalam penelitian ini didukung dengan data empiris. Hasil pengujian secara empiris menunjukkan bahwa nilai  $t$  hitung sebesar 2,541 dan signifikansi sebesar 0,014. Nilai  $t$  hitung tersebut lebih besar dari nilai  $t$  tabel (1,6598) dengan signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa di Kabupaten Kediri.

Terdapat pengaruh signifikan akuntabilitas terhadap kualitas informasi laporan keuangan menunjukkan bahwa perangkat desa mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan desa secara bertanggung jawab. Praktik pelaporan keuangan desa dilakukan secara jujur dan terukur sesuai dengan peraturan pendung-undangan yang berlaku sehingga terhindar dari penyalahgunaan wewenang. Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara berkala dan tepat waktu, karena dukungan Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes). Akuntabilitas juga terjadi karena adanya pengawasan dan audit oleh pihak terkait, misalnya: camat, inspektorat, BPKP dan BPK. Hasil penelitian ini menjustifikasi beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rahmatika, Dien Noviany; Afiah, 2014), (Upabayu, Mahaputra and Putra, 2014), (Anom, Dewi and Suardani, 2018), (Mursidah and Khairina, 2018), dan (Astuti, 2020).

Hipotesis keempat penelitian ini yang menyatakan bahwa budaya hukum berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa di Kabupaten Kediri berdasarkan hasil analisis tidak dapat dibuktikan secara empiris. Hasil olah data sebagaimana disajikan pada tabel 7 menunjukkan bahwa nilai  $t$  hitung sebesar 1,487 dan signifikansi sebesar 0,144. Nilai  $t$  hitung tersebut lebih besar dari nilai  $t$  tabel (1,6598) dengan signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa budaya hukum berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori *stewardship* yang menyatakan bahwa segala tindakan manajemen diutamakan untuk kepentingan organisasi dalam merealisasikan visi dan misinya dan bukan diorientasikan untuk kepentingan individu manajemen. Budaya hukum dalam konteks GPG pada pemerintahan desa dilaksanakan dengan tujuan kepatuhan terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masyarakat desa.

Oleh karenanya lembaga pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya juga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada termasuk dalam hal penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan desa secara konsisten dan berkesinambungan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa budaya hukum kurang mendapatkan atensi dalam pelaporan keuangan desa. Hasil penelitian ini mengonfirmasi penelitian (Kawedar *et al.*, 2019) yang menyatakan bahwa *good governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada organisasi sektor publik (pemerintahan).

Pada hipotesis kelima dalam penelitian ini dinyatakan bahwa kewajaran dan kesetaraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa di Kabupaten Kediri. Berdasarkan hasil olah data pada tabel 7 didapatkan bahwa nilai  $t$  hitung sebesar 0,302 dan signifikansi sebesar 0,000. Nilai  $t$  hitung tersebut lebih kecil dari nilai  $t$  tabel (1,6598) dengan signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian hipotesis kelima dalam penelitian ini dapat dibuktikan dengan data empiris, dan dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kewajaran dalam penggunaan Siskeudes semakin tinggi pula kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah desa.

Kewajaran dan kesetaraan dalam GPG diartikan sebagai penerapan standar layanan yang berkualitas dengan memperhatikan lingkungan, kepentingan, masukan dari masyarakat, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi kewajaran dan kesetaraan dalam pengelolaan keuangan desa berupa penggunaan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes). Penggunaan aplikasi ini dapat memberikan nilai tambah dalam penegelolaan keuangan desa, baik pada aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua desa di Kabupaten Kediri telah memanfaatkan sistem aplikasi ini dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Rahmatika, Dien Noviany; Afiah, 2014), (Upabayu, Mahaputra and Putra, 2014), (Anom, Dewi and Suardani, 2018), (Astuti, 2020), dan (Mursidah and Khairina, 2018).

Pada Tabel 8 didapatkan nilai *Adjusted Square* sebesar 0,347. Hal ini berarti bahwa pengaruh variabel independen yaitu GPG yang terdiri atas: demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, dan kewajaran dan kesetaraan memberikan kontribusi pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu kualitas informasi laporan keuangan sebesar 0,347 atau 34,7%. Dengan demikian variabel kualitas informasi laporan keuangan sebesar 65,3% dipengaruhi oleh selain dari lima variabel tersebut.

## SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa GPG yang terdiri dari akuntabilitas dan kewajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa di Kabupaten Kediri, sementara hipotesis yang menyatakan bahwa demokrasi, transparansi, juga budaya hukum berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa di Kabupaten Kediri tidak didukung data empiris. Namun demikian semua unsur PGP yang meliputi: demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, dan kewajaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa di Kabupaten Kediri.

Hasil penelitian ini masih perlu ditidakanjuti dengan penelitian-penelitian lanjutan guna menguji keterkaitan antara elemen-elemen GPG dengan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah desa dengan berbagai disain yang dikembangkan lagi, misalnya dengan memasukkan variabel-variabel lain sebagai tambahan, mendisain ulang kuesioner, menambah jumlah sampel, dan memilih responden yang lebih relevan dan selektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anom, I. G. N. A. A. P., Dewi, I. G. A. A. O. and Suardani, N. L. R. (2018) 'Pengaruh Implementasi Good Public Governance', *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis Volume 3, No. 2*, Desember 2018, 3(2), pp. 210–225. Available at: <http://journal.undilnas.ac.id/index.php/akuntansi/>.
- Astuti, R. W. (2020) 'Pengaruh Good Public Governance dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan di Pemerintahan Kota Ambon', *Jurnal Akuntansi*, 6(2), pp. 39–51.
- Azlina, N. and Amelia, I. (2015) 'Pengaruh Good Governance Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan', *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 12(2), p. 32. doi: 10.19184/jauj.v12i2.1409.
- Dwi Susanto, Dian Anggraeni Yusuf, and Y. R. (2014) 'Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas

- Pemberian Layanan Publik', *Jurnal Paradigma*, 12(2), pp. 73–91.
- Dyah Setyaningrum, R. W. and A. S. (2017) 'Good Public Governance, Curruption and Public Service Quality: Indonesia Eviden', *International Journal of Applied Budiness and Economic Research*, 15(19), pp. 327–338.
- Fadilah, S. (2013) 'The Influence of Good Governance Implementation to Organization Performance : Analysis of Factors Affecting Study on Intitution Amil Zakat Indonesia )', *international Journal of Social Sciences*, 7(1), pp. 15–33.
- Fahmi, M. and Syah, J. (2016) 'Pengaruh Good Public Governance ( Gpg ) Terhadap Kinerja Guru Ekonomi Sma / Ma Negeri Di Kota Salatiga , Kabupaten Semarang , Dan Kota Semarang Dengan Teacher ' S Work Engagement ( Twe ) Sebagai Variabel Intervening', *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 26(1), pp. 20–27.
- Harlinda, H. (2016) 'Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau)', *Sorot*, 11(2), p. 127. doi: 10.31258/sorot.11.2.3890.
- Hasthoro, H. A. and Sunardi, S. (2016) 'Tata Kelola Publik Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(1), p. 53. doi: 10.24914/jeb.v19i1.480.
- KASP (2019) *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Indonesia.
- Kawedar, W. et al. (2019) 'Good Governance, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kinerja Keuangan Organisasi Sektor Publik', *Matrik : Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*, 13(2), p. 214. doi: 10.24843/matrik:jmbk.2019.v13.i02.p09.
- KNKG (2008) *Good Public Governance Indonesia, Good Public Governance Pedoman Umum Indonesia*.
- Modo, S. M., Saerang, D. P. E. and Poputra, A. T. (2016) 'ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud)', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing 'Goodwill'*, 7(2), pp. 127–144. doi: 10.35800/jjs.v7i2.13550.
- Moedarlis, F. T. (2016) 'Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa', pp. 1–17.
- Mursidah and Khairina (2018) 'Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan Asuransi Ajb Bumiputera Kc Lhokseumawe Dan Pt Taspen Kc Lhokseumawe)', *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), pp. 41–48.
- Rahmatika, Dien Noviany; Afiah, N. N. (2014) 'The Impact of Internal Audit Function Effectiveness on Quality of Financial Reporting and its Implications on Good Government Governance Research on Local Government Indonesia', *Research Journal of Finance Accounting*, 5(1), pp. 64–75.
- Uar, A. (2016) 'Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Ambon', *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), pp. 1–11. doi: 10.26618/ojip.v6i1.31.
- Upabayu, I. P., Mahaputra, R. and Putra, I. W. (2014) 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah', *E - Jurnal Akuntansi Univ ersitas Udayana*, 8(2), p. 230244. doi: 10.15294/jda.v7i2.4124.
- Zeyn, E. (2011) 'Pengaruh good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi', *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), p. 21. doi: 10.22219/jrak.v1i1.497.